

# NAHDLATUL WATHAN DAN MASYARAKAT SIPIL

(Studi Gerakan Sosial atas  
Manifestasi *Civil Society* pada Masyarakat Lombok)

**Muh. Alwi Parhanudin, S. Sos., M. SI.**

*Pengajar di Universitas Nahdhatul Wathan dan STMIK Syaikh Zainuddin  
NW Anjani Lotim Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.*

**Abstrak :** *Peradaban masyarakat Lombok pada realitas sekarang lahir dan berangkat dari revolusi yang diprakarsai oleh para Tuan Guru dan aristokrat di tahun 1819 melawan penjajahan atas masyarakat Sasak (Lombok) oleh kekuatan politik luar, suatu fenomena yang mencerminkan awal mula sejarah civil society dan berpijak pada kekuatan ideologis serta pengukuhan integritas masyarakat Lombok. Di awal tahun 1953, munculnya organisasi Nahdlatul Wathan (NW) mungkin saja dapat dikatakan sebagai salah satu tanda perkembangan civil society, akan tetapi klaim tersebut harus selalu diinterogasi dengan ada tidaknya penegasan identitas politik organisasi NW, di tengah-tengah keberadaannya sebagai identitas sosial masyarakat Lombok. Hingga dengan saat ini, NW masih memerlukan berbagai rekonstruksi teologi politik dan restorasi nilai civil society, beberapa tuntutan proses yang akan menentukan signifikansi NW sebagai suatu gerakan sosial keagamaan yang seutuhnya berpihak pada masyarakat sipil, mulai dari equilibrium politik sampai arsitektur sosial masyarakat Lombok.*

**Kata Kunci :** Nahdlatul Wathan, Masyarakat Lombok, *Civil Society*.

## **Pendahuluan**

Dalam berbagai studi tentang masyarakat, khususnya diskursus ilmu-ilmu sosial, *civil society* memperoleh tempat yang signifikan selain sebagai ciri dan idealitas, juga sebagai tolok ukur bagi kemajuan dan keberadaban suatu bangsa dalam koridorasi pandangan politik demokrasi. Oleh karena itu suatu masyarakat

dalam kebangsaan demokratik haruslah terakumulasi dalam satu garis besar karakteristik, yaitu *civil society*.

Banyak sekali definisi *civil society*. Beberapa diantaranya yang dapat diungkapkan disini antara lain : Hegel berpendapat bahwa ketika para individu telah mampu keluar dari lingkaran tradisional dan alamiah, semisal keluarga dan tetangga, menuju ruang sosial yang lebih besar di mana terdapat dinamika sosial yang kompleks berupa persaingan-persaingan seputar ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Ruang sosial tersebut dapat disebut sebagai *civil society*.

Karl Marx, melanjutkan rasionalisasi Hegel, bahwa ruang sosial tersebut adalah kenyataan yang belum final, karena tidak terdapat relasi politis yang adil, terutama seputar ekonomi yang akan melahirkan kelas-kelas sosial, yakni kelas borjuis dan proletariat. Kelas bermodal, yang disebut Max sebagai kelas borjuis, dengan memiliki kekuatan politik melalui nilai tawar ekonominya akan sepenuhnya mampu membangun sistem hegemoni dalam relasinya dengan negara, dan melalui negara itu masyarakat bawah atau akan dikooptasi dan memperbudak, yang akan melahirkan kelas proletar. Ketika kelas proletar ini telah muak dengan kooptasi dari negara dan kelas bermodal, mereka akan melaksanakan revolusi menuju masyarakat tanpa kelas, dan inilah idealitas dari *civil society*.

Antonio Gramsci, seorang Marxist membantah determinisme ekonomi dan dialektika sejarah dari Marx dengan rasionalisasinya tentang sistem hegemoni. Ia menyatakan bahwa selama sistem hegemoni berjalan dengan baik, maka tidak akan ada revolusi dari kelas bawah. Hal ini disebabkan oleh pertama, hegemoni tersebut mengandalkan tidak hanya kekuatan-kekuatan materil akan tetapi juga mengandalkan simbol-simbol yang dianggap relevan dalam membangun sistem hegemoni itu seperti simbol-simbol keyakinan atau keagamaan dan kebudayaan. Kedua, hegemoni tersebut menghasilkan relasi keterikatan yang baik dan adil, di mana kelas menengah akan memberikan penawaran kepada kelas bawah, begitu juga kelas bawah akan mengajukan syarat-syarat.

Tocqueville berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat selamanya terhegemoni oleh kekuatan-kekuatan kelas menengah

melalui negara atau negara melalui kelas menengah. *Civil society* harus memiliki kekuatan politik yang sebanding dan sejajar dengan negara, sehingga civil society sekaligus juga sebagai pengontrol kebijakan publik yang diberlakukan kepada mereka. Masyarakat haruslah mandiri, mencerminkan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan terlepas dari pengaruh-pengaruh politik negara.

Di Indonesia, beberapa istilah yang menyepadani *civil society* seperti misalnya Masyarakat Madani, yang oleh Nurcholish Madjid secara sederhana didefinisikan sebagai masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, HAM dan demokrasi. Secara epistemologi masyarakat madani kemudian diidentikkan dengan masyarakat Madinah pada masa Rasulullah. Beberapa yang lain seperti masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil dan lain sebagainya yang tetap merujuk pada arti dan epistemologi seperti halnya *civil society* di Barat.

Memang tidaklah mudah bila telah berbicara tentang realitas bangsa Indonesia ketika disejajarkan dengan prinsip dasar *civil society*, terlebih dalam berbagai daerah tertentu yang memang secara ukuran politik, ekonomi dan budaya belum mengalami keterbukaan dan dinamika yang lebih kompleks. Realitas tersebut berangkat dari berbagai faktor yang melatari beragamnya dimensi-dimensi sosial yang seharusnya eksis sebagai ruang *civil society* dalam komunitas sosial, seperti misalnya kemandirian kelas menengah, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, hingga LSM.

Beberapa persoalan mendasar dalam menganalisa berbagai dimensi *civil society* tersebut adalah tentang bagaimana dinamika eksistensinya, serta bagaimana komunitas yang 'berafiliasi' terhadapnya menyematkan label dasar identitas politik. Kedua hal ini, yang mungkin secara ilmiah dalam diskursus ilmu sosial dapat disebut sebagai gerakan sosial dan identitas politik, dapat menjadi introduksi bagi studi-studi lebih lanjut tentang transformasi *civil society* di berbagai masyarakat dengan ragam karakteristik, kultur hingga keyakinan yang menjadi dimensi-dimensi determinan di dalamnya.

Beragam istilah yang kontras dengan nilai-nilai *civil society* seperti tradisionalitas dan eksklusivitas, ketidakmandirian dan

ketergantungan kepada pemerintah, baik secara finansial dan ekonomi atau dalam relasi politik dan pemberdayaan komunitas, adalah berbagai hal yang patut dianalisa secara mendalam. Termasuk juga terhadap bagaimana individu dan komunitas menjadikannya sebagai identitas keagamaan, kebudayaan, hingga politik.

**Social movement** dalam studi ilmu sosial adalah teori (*theory*) dan sekaligus sebagai pendekatan (*approach*) dalam menganalisa fenomena-fenomena sosial. Begitu pula dengan **political identity**, yang menganalisa tentang pengaruh daripada suatu gerakan sosial itu diterima dan bahkan dijadikan sebagai sumber identitas atau afiliasi politis dari berbagai individu dan komunitas. Beberapa pendekatan ini akan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip **civil society**, dalam hal menggali potensi-potensi dasar kemasyarakatan yang selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam retransformasi dan restorasi nilai-nilai **civilize** dalam dinamika sosial masyarakat. Para akademisi gerakan sosial cenderung memakai empat model pendekatan yang ‘terbaru’ dalam studi tersebut, yaitu Struktur Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, Proses **Framing** dan **Repertoire**

Struktur kesempatan politik diartikan sebagai sebuah perubahan struktur politik dalam dinamika sosial yang menyebabkan munculnya inisiatif baru berbentuk gerakan sosial. Perubahan struktur tersebut dipandang oleh berbagai kalangan di publik sebagai kesempatan, dan melahirkan gerakan-gerakan sosial. Struktur Mobilisasi diartikan sebagai sejumlah cara yang dilakukan oleh kelompok gerakan sosial melebur di dalam aktis-aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial.<sup>1</sup> Adapun **framing** akan menjadi salah satu pendekatan yang dipakai dalam menganalisa sejauh mana gerakan sosial mengemas berbagai isu dan wacana serta memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka mempertahankan eksistensi gerakannya. Yang terakhir, **Repertoire** merupakan pendekatan dalam mengungkap berbagai alasan-alasan terjadinya gerakan yang sifatnya kolektif dan ekspresif.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahib Situmorang, **Gerakan Sosial, Studi Kasus Beberapa Perlawanan** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p. 7.

## Dinamika Sosial Masyarakat Lombok

Jika AS. Hikam mengawali analisa akar-akar *civil society* di Indonesia dengan menguak berbagai dinamika sosial politik dan ekonomi seperti revolusi, perkembangan kelas menengah dan pembentukan sosial baru pasca kemerdekaan,<sup>2</sup> maka mencari akar-akar *civil society* di Lombok pun mungkin akan mengikuti pola itu. Pada tahun 1819 orang Muslim dari suku Sasak di Lombok memberontak terhadap pemerintahan raja Bali di pulau mereka, yaitu *Anak Agung Ngruh Ketut Karang Asem*.<sup>3</sup> Ini bukanlah pemberontakan yang pertama, tetapi memang yang paling dahsyat. Pemberontakan ini tidak dapat dihentikan. Pemberontakan ini telah menyebabkan berakhirnya satu setengah abad kekuasaan Bali di pulau Lombok dan mengundang campur tangan Belanda.

Para aristokrat Sasak yang memang dikenal tidak terlalu dapat dipersatukan satu sama lain apalagi dalam integrasi politik, pada pemberontakan tersebut mereka bersama-sama tampil melawan kekuasaan kerajaan Mataram. Di bawah petunjuk seorang Tuan Guru, yakni Tuan Guru Haji Ali Batu, tercatat Raden Sribanom, Raden Mustiaji, Raden Melaya, Jero Ginawang, beberapa lagi Aristokrat Pringgabaya, Kopang, dan Batukliang.<sup>4</sup> Pemberontakan, atau lebih tepatnya “revolusi lokal” ini memiliki bias yang sempurna bagi tatanan baru masyarakat Sasak, khususnya dalam mengelaborasi kebudayaan dan keyakinan di tengah-tengah nuansa kebebasan.

Fenomena kesejarahan ini membuktikan bentuk rekonstruksi sosial yang sangat bercorak *civil society*. Berawal dari gerakan sosial kaum tarekat yang memiliki pengaruh terhadap para aristokrat Sasak di satu sisi, dan para aristokrat Sasak yang menjadikan Tarekat sebagai salah satu garis utama identitas politik

---

<sup>2</sup> Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: Pustaka LP3S, 1996), p. 3-7. Referensi yang berkaitan, khususnya tentang sejarah, dinamika sosial dan politik di Indonesia. Lihat juga Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011).

<sup>3</sup> Van der Kraan dalam Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), p. 118-119.

<sup>4</sup> *Ibid*, p. 115.

mereka, secara bersama-sama membangun dialektika sejarah melalui pemberontakan terhadap kekuasaan luar yang berkuasa di wilayah mereka. Berpihaknya kemenangan dan kebebasan tersebut kemudian menciptakan berbagai perubahan secara perlahan, terutama dalam konversi budaya, politik, ekonomi, dan tentu saja agama. Sebagai contoh, sekarang ini terdapat kurang lebih 2.687.128 jiwa atau sekitar 94.8% memeluk ajaran Islam,<sup>5</sup> suatu penegasan identitas yang kiranya berawal dari revolusi politik dan sosial tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Islam, terlepas dari berbagai sekte dan klasifikasi atas integrasinya dengan tradisi lokal,<sup>6</sup> adalah agama dan sekaligus sebagai salah satu dari fondasi kebudayaan (*root of civilization*) masyarakat Lombok.

Pada perjalanannya, manifestasi Islam dalam budaya masyarakat dapat ditemukan dalam banyak sekali dimensi sosial. Akan tetapi eksistensi Islam sebagai manifestasi *civil society* mungkin tidaklah berupa manifesto sosial yang signifikan. Dalam banyak kasus dan realitas, Islam justru dijadikan sebagai komoditas kepentingan kelas menengah dan negara. Islam hanya salah satu dari dimensi sosial yang memiliki banyak sekali simbol yang dapat dijadikan alat dalam memperkuat sistem hegemoni bagi kekuasaan. Sistem hegemoni dalam skala politik dan kapitalisme dalam skala ekonomi yang kadang tidak memungkinkan kemandirian masyarakat kemudian mencerminkan fenomena umum dalam lingkaran objek politik, yaitu keterbelakangan di tengah-tengah ribuan potensi kemajuan dari ekspresi alam dan kemanusiaan.

Fenomena ini mungkin saja merupakan salah satu bukti bagi tidak berjalannya dialektika peradaban yang searah dengan prinsip-prinsip *civil society*. Dialektika tersebut memang merupakan sesuatu yang alamiah dalam perjalanan politik dan sosial masyarakat Lombok, suatu dialektika yang tidak boleh disalahkan ketika harus disejajarkan di kemudian hari dengan datangnya konsepsi-konsepsi

---

<sup>5</sup> Data Kanwil Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2001.

<sup>6</sup> Terdapat berbagai klasifikasi terhadap Islam di Lombok. Salah satu klasifikasi yang paling dikenal adalah *Boda, Wetu Telu* dan Waktu Lima. Lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta : LKiS, 2000).

sosial, khususnya *civil society*. Akan tetapi kesinambungan dan proses-proses menuju kedewasaan masyarakat, khususnya dengan mulainya kompleksitas dan kesadaran sosial yang lebih politis (terutama ketika bergulirnya sistem otonomi daerah) menuntut artikulasi yang lebih matang dan kritis dalam mendefinisikan ekspresi sosial itu.

Pada saat ini, Lombok terasa lebih dekat dengan *stereotype* Islam, idealitas demokrasi dan sedikit memperlihatkan *civil society*. Adalah dinamika yang sulit untuk tidak diapresiasi ketika Lombok mampu berdialog dan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan zaman di saat kondisi inklusifitas sosial dan politik yang mungkin secara eksplisit tidak terlihat terlalu potensial. Di awal-awal bergulirnya orde reformasi, Lembaga-lembaga swadaya masyarakat mulai bermunculan, disusul dengan kritisme media, adaptasi berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, hingga munculnya kelas-kelas sosial yang saling berinteraksi secara politis dan (kemungkinan) *fair* satu dengan yang lain.

### **Fenomena Gerakan Sosial; Hadimnya Nahdlatul Wathan**

Nahdlatul Wathan (selanjutnya disingkat NW) didirikan oleh Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (selanjutnya disebut Syaikh Zainuddin) pada tanggal 15 Djumadil Akhir 1373 H. atau 1 Maret 1953 M. di Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.<sup>7</sup> Pada awalnya organisasi ini merupakan suatu kebutuhan administrasi bagi berkembangnya Da'wah Islamiyyah dan merebaknya lembaga-lembaga pendidikan berupa madrasah-madrasah yang dipelopori oleh Syaikh Zainuddin. Pada awal tahun 1953 tersebut, terdapat 66 madrasah yang berkembang di bawah sistem da'wah Syaikh Zainuddin,<sup>8</sup> yang semuanya aktif, mengembangkan diri, tersebar di seluruh pelosok Pulau Lombok. Oleh karena itu merupakan suatu tuntutan untuk membentuk organisasi sebagai lembaga kontrol secara lebih profesional.

---

<sup>7</sup> Mohammad Nor dkk., *Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1907-1997* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2004), p. 205.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 206-208.

Pada tahun itu, mungkin hanya segelintir saja orang Sasak dapat membayangkan bahwa di kemudian hari organisasi ini akan menjadi faktor determinan bagi majutidaknya masyarakat Lombok. Hingga dengan saat ini, hampir di setiap dusun di sebagian besar wilayah Lombok berdiri Madrasah Nahdlatul Wathan dan mempengaruhi banyak sisi kompleksitas sosial di berbagai tempat dan komunitas itu. Ia telah melebur dalam banyak sekali paradigma dan transformasi umum di masyarakat Lombok secara konvergensi.

NW sendiri memiliki tiga bidang pokok sebagai orientasi aktivitas kelembagaannya, yakni pendidikan, sosial dan dakwah, tiga bidang yang secara signifikan menjadi jalur utama NW dalam berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Berjalannya tiga bidang yang teraktualisasi dalam berbagai program dan kelembagaan, telah membangun masyarakat yang bergabung secara total kepada Nahdlatul Wathan dalam klaim diri 'Nahdliyin'. Nahdliyin adalah sebutan bagi komunitas atau masyarakat yang menjadikan NW sebagai identitasnya dalam banyak dimensi sosial, dari yang sangat ideologis seperti Islam, hingga yang sangat politis seperti afiliasi partai.

#### 1. NW dan Struktur Kesempatan Politik

Adalah benar jika mendalami analisa Tocqueville ketika menggambarkan peluang gerakan sosial, dalam hal ini pada konteks revolusi misalnya, yang hanya terjadi bilamana masyarakat telah terbuka (inklusif). Kata Tocqueville, tidak mungkin revolusi terjadi pada masyarakat yang masih tertutup dan tidak memiliki dinamisme dalam membangun dinamisme serta dialektik sosial di komunitasnya. Bila akan membawa kerangka ***political opportunity structure*** ke ruang Nahdlatul Wathan dalam dinamika kehadiran, perkembangan dan keberlanjutannya, maka akan ditemukan banyak sekali faktor-faktor bagi kenyataan itu yang memang mencerminkan ***political opportunity***. Perubahan struktur politik pasca revolusi misalnya, yang memberikan keleluasaan bagi segenap warga negara dalam mengekspresikan setiap pola gerakan yang akan membawa identitas, karakteristik hingga aspirasi politiknya. Ditambah lagi dengan fenomena sosial di Lombok ketika itu

yang hiruk-pikuk ketegangan publik terhadap dominasi politik dan lembaga keagamaan, yang memunculkan ragam inisiatif penyepadanan dari banyak tokoh agama dan politik di Lombok, termasuk Syaikh Zainuddin.

Sebagai contoh, sebelum mendirikan NW Syaikh Zainuddin adalah konsulat NU di Lombok, dan menjadi ketua Badan Penasehat Masyumi NTB. Ini terjadi pada sekitar tahun 1952. kebijakan NU yang pada saat itu keluar dari Masyumi dan bergabung dengan gerakan politik lainnya, Syaikh Zainuddin tetap setia mendukung Masyumi dengan mendirikan organisasi lokal baru sebagai representasi dan basis politik, yaitu Nahdlatul Wathan, dan sempat terpilih menjadi anggota Konstituante RI hasil pemilu pertama tahun 1955 mewakili Masyumi. Dalam perkembangan NW, misalnya di masa Orde Baru, NW mendukung Parmusi dan selanjutnya dialihkan ke Golkar.<sup>9</sup> Syaikh Zainuddin tentu saja memiliki pertimbangan yang relatif *fair* secara politik dan sosial dalam spekulasi tersebut. Kesempatan politik yang terlihat, khususnya pada tataran NTB kemudian menyebabkan NW semakin utuh dalam berbagai relasi di jalur-jalur politik nasional serta pemberdayaan politik lokal yang tidak lain adalah bentuk dari pendewasaan politik dan pengelolaan potensi *civil society* di Lombok. Demikian juga pada saat ini, munculnya kader NW yakni cucu dari Syaikh Zainuddin sendiri (Dr. TGH. M. Zainul Madjdi, MA.) yang terpilih sebagai Gubernur NTB tidak lain merupakan bukti dari nilai tawar NW dalam percaturan politik lokal dan nasional, integritas internal organisasi NW dan kemampuannya dalam membangun relasi dengan berbagai klasifikasi sosial yang lain.

Melihat kenyataan NW dalam memanfaatkan kesempatan politik (*political opportunity*) tidaklah harus diterjemahkan secara lugas dan spekulatif. Artinya terdapat pemberdayaan politik dengan tetap terikat pada standar etika

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 458.

religius Syaikh Zainuddin<sup>10</sup> yang terjadi di kalangan Nahdliyin secara sukarela dan swadaya dengan memusatkan aspirasi pada kepentingan organisasi secara khusus dan masyarakat NTB secara umum, kedewasaan berpolitik dan ciri bagi tumbuhnya kekuatan-kekuatan sosial masyarakat.

## 2. NW dan Struktur Mobilisasi Sosial

Terdapat beberapa model, program dan kelembagaan organisasi Nahdlatul Wathan yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk, mobilisasi formal dan informal. Dalam proses mobilisasi formal terdapat berbagai lembaga badan otonom selain organisasi NW, seperti dibentuknya badan-badan otonom yakni HIMMAH NW (Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan), Muslimat NW, Nahdliyat NW, IPNW (Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan), PGNW (Persatuan Guru Nahdlatul Wathan), ISNW (Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan) dan berbagai badan kajian dan pengembangan masyarakat. Badan-badan otonom ini adalah jalur yang mungkin paling determinan dalam menjadi faktor keberlangsungan organisasi. Mengingat NW adalah organisasi yang sangat terbatas dalam menjalankan program-program spesifik khususnya dalam menyentuh secara menyeluruh berbagai kelas dan tingkatan sosial masyarakat. Oleh karenanya badan-badan otonom tersebut adalah perpanjangan tangan (kontrol) dari organisasi NW.

Selain itu, dalam bidang keamanan didirikan Hizbullah NW di Anjani atau Satgas Hamzanwadi di Pancor, barisan-barisan pada orientasi keamanan yang sangat

---

<sup>10</sup> Dalam ragam karyanya, Syaikh Zainuddin senantiasa menekankan etika dan moralitas sebagai frame aktivitas politik. Salah satu cukup menggambarkan pemikiran politik Syaikh Zainuddin seperti Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru. Wasiat ini sering dipandang sebagai *core-statement* dari Syaikh Zainuddin, tidak hanya dalam persoalan agama melainkan juga pandangannya terhadap realitas politik, sosial, pendidikan hingga hal ihwal lainnya yang terangkum secara komprehensif. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Wasiat Renungan Massa Pengalaman Baru* (Pancor : PBNW, 1998).

diapresiasi masyarakat. Barisan ini pun secara formal mengadakan agenda rutinitas yakni Layatan,<sup>11</sup> pendirian posko-posko di setiap dusun, maupun kerjasama dengan badan-badan keamanan baik pemerintah maupun swasta. Semuanya merupakan bentuk mobilisasi sosial yang sangat signifikan dan strategis yang sangat menguntungkan organisasi. Beberapa hal yang telah dijadikan tradisi masyarakat oleh NW seperti rutinitas hiziban,<sup>12</sup> Wirid Khusus Nahdlatul Wathan,<sup>13</sup> perkumpulan-perkumpulan muslimat dan berbagai bentuk lain yang relevan. Lebih dari itu, kegiatan penyebaran majelis-majelis *taklim* juga dapat dikatakan sebagai faktor utama dari perkembangan NW. Secara terperinci sebenarnya sangat banyak hal formal yang sangat mencerminkan mobilitas sosial yang berjalan dalam organisasi NW, baik sebagai bentuk konsolidasi internal maupun dalam jaringan sosial eksternal, yang terakumulasi secara formal baik dalam program-program bidang pendidikan, sosial, dakwah, hingga politik.

---

<sup>11</sup> Layatan adalah program barisan yang bersifat rutin dan kondisional. Bila ada anggota barisan yang meninggal dunia maka seluruh anggota akan memenuhi rumah duka. Program ini sangat potensial dalam membangun integritas organisasi dan loyalitas masyarakat terhadap Barisan, dan terutama terhadap organisasi Nahdlatul Wathan. Pada saat ini terdapat dua Barisan di tubuh NW, yakni Hizbullah NW (didirikan pada tanggal 6 Syawal 1420 H/ 13 Januari 2000 M) dan Satgas Hamzanwadi. <http://www.nw.or.id/berita/9-hizbullah-nw>, diakses 01 Januari 2012.

<sup>12</sup> Hizib Nahdlatul Wathan merupakan kumpulan lebih dari 70 doa waliyullah yang dihimpun, serta disempurnakan oleh Syaikh Zainuddin. Di beberapa tempat, Hiziban adalah program mingguan pada tataran dusun, Hiziban Akbar pada tataran desa, dan beberapa kegiatan pembacaan yang secara berkala melibatkan seluruh warga Nahdlatul Wathan. Lihat TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Hizib Nahdlatul Wathan & Hizib Nahdlatul Banat*, Terj. Abdul Hayyi Nu'man (Anjani : PBNW, 2003).

<sup>13</sup> Berdasarkan pada Tharekat Hizib yang didirikan oleh Syaikh Zainuddin berbentuk pengijazahan berbagai macam amalan-amalan dan do'a do'a berikut kaifiyat pada masing-masing amalan itu. Thariqat Hizib Nahdlatul Wathan (THNW) dikelola secara terstruktur dan hirarkis dan warga Nahdlatul Wathan yang ingin secara resmi tercatat sebagai anggota dari Thariqat ini harus melewati prosedur tertentu, seperti pengijazahan dan pembai'atan.

Dalam proses mobilisasi informal, kiranya untuk pertama-tama hubungan antara murid dan guru patut disorot secara lebih mendalam. Sebagai contoh dalam hal ini adalah loyalitas kader yang berangkat dari *Ma'had Dar al-Qur'an wa al-Hadist* (MDQH), yang masing-masing daripadanya menjalani pendidikan agama dan penumbuhan karakter kerohanian selama empat tahun. Alumnus dari MDQH ini ketika pulang ke komunitas masing-masing kemudian menyebarkan NW sebisa mungkin melalui pendirian madrasah dan pondok pesantren, majelis taklim, membangun akomodasi sosial, hingga berperan dalam bidang politik dalam momen-momen tertentu. Setiap dari alumnus itu selalu saja memiliki kontribusi besar bagi komunitasnya, paling tidak sebagai seorang tokoh agama, suatu posisi yang potensial berpengaruh dan memegang posisi-posisi lain dalam realitas sosial masyarakat Lombok. Selain itu, terdapat tradisi yang telah lama dibangun oleh Syaikh Zainuddin dalam mempererat kekerabatan yang berporos loyalitas ke-NW-an, misalnya melalui nikah massal,<sup>14</sup> Hultah NWDI, peringatan hari-hari besar Islam,<sup>15</sup> manifestasi amal sholeh dan lain sebagainya. Hal-hal demikian merupakan proses yang secara informal telah menjadikan masyarakat nadhiyin menjadi semakin solid, terkontrol dan loyal.

---

<sup>14</sup> Nikah massal biasanya dilaksanakan pada saat Hultah NWDI atau Ad-Dzikro al-Hauliyah MDQH NW. Pada saat sekarang ini tradisi tersebut seperti yang agak jarang dilakukan, akan tetapi banyak yang masih sering memilih mengadakan akad nikah di perhelatan HULTAH NWDI atau pada saat Pengajian Pagi MDQH (Ma'had Dar al-Qur'an wa al-Hadist), dengan tujuan agar disaksikan keabsahannya oleh banyak warga NW yang lain dan memperoleh keberkahan di dalam pernikahan tersebut.

<sup>15</sup> Beberapa program rutin tahunan seperti peringatan Tahun baru hijriyah, ijtima' Ramadhan, 10 Muharram, Isra' dan Mi'raj adalah hari-hari besar Islam yang telah ditradisikan oleh NW dengan karakteristik tersendiri, yang melibatkan masyarakat dengan sentuhan yang lebih kultural, psikial dan religius.

### 3. NW dan *Framing Process*

Sebenarnya tiga bidang yang telah ditentukan NW sebagai jalur utama orientasi kelembagaannya pun dapat dikatakan sebagai proses *framing* organisasi NW ketika melihat bahwa ketiga bidang itu sangat kontekstual baik sebagai wacana, problematika ataupun dimensi-dimensi primer dalam masyarakat Lombok. Pendidikan adalah salah satu dimensi sosial yang paling penting dalam penting dan wacana kependidikan adalah diskursus yang paling ramai dibicarakan ketika akan mengoreksi kondisi IPM NTB, khususnya Lombok. Tentu saja program pendidikan merupakan salah satu strategi, tidak hanya sebagai solusi bagi problematika kependidikan di Lombok namun juga sekaligus sebagai penopang eksistensi NW di tengah-tengah masyarakat. Jaringan madrasah yang tersambung secara ideologis dengan tonggak-tonggak bagiannya yang telah menguat di sebagian besar pedusunan Lombok telah semakin menguatkan keyakinan masyarakat tentang betapa besar jasa NW dalam peningkatan intelektualitas masyarakat. Begitu pula dengan wilayah sosial-kemasyarakatan yang disentuh NW melalui program sosial, sebagian besar berupa kelembagaan.

Dalam analisa transformasi idealitas dan ideologis ke-NW-an, media dakwah adalah sejatinya proses *framing* organisasi. Melalui media dakwah itu, NW selalu hadir menjadi idealitas wacana, berikut dengan integrasi-interkoneksinya dengan beragam doktrin keagamaan seperti tasawwuf, fiqh, dan akhlak. di setiap hari seorang PB NW telah memiliki jadwal tertentu berupa pengajian rutin keliling kampung sebanyak dua kali dalam dua tempat yang berbeda, semisal pagi dan sore. Itu artinya selama satu bulan PB NW telah dapat mengunjungi setiap kampung di satu hingga dua kecamatan penuh. Rutinitas yang berupa momentum itulah yang menjadi media bagi penyodoran beragam wacana, diskursus, isu hingga penggalangan simpatisan melalui ceramah pengajian para Tuan Guru NW yang rata-rata *faqih* dan faham alur-alur komunikasi kontekstual.

#### 4. NW dalam Realitas Politik

Orang mungkin dapat mengatakan bahwa NW adalah salah satu jalur bagi negara di dalam menancapkan pengaruh-pengaruh politik di masyarakat Lombok. Orang mungkin juga dapat mengatakan bahwa kritisme yang terbangun pada masyarakat NW secara umum belum menemukan signifikansi. Suatu organisasi kemasyarakatan memang akan selalu berproses sesuai dengan alur-alur politik negara, karena objeknya tidak lain adalah ruang sosial yang memiliki relasi, jaringan dan timbal-balik sangat politis dengan negara. Yang harus dipahami secara kultural kebangsaan adalah bahwa kemandirian politik di Indonesia, apalagi di Lombok, tidak berarti harus berseberangan dengan negara melainkan saling berinteraksi secara *fair* melalui kesadaran politik yang terakumulasi dalam sistem hegemoni sosial. Akan sulit bagi NW apabila di satu sisi berfungsi sebagai agen negara dalam mendelegasikan kepentingan politiknya terhadap masyarakat Lombok, namun di sisi lain adalah ruang sosial tempat berinteraksinya berbagai kelas sosial, tokoh masyarakat dan cendekiawan yang merepresentasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Lombok secara umum.

Penentuan identitas dalam skala politik kiranya dapat terlihat pada sisi normatif NW, misalnya pada Khittah organisasi yang tidak memperbolehkan NW berafiliasi secara kelembagaan formal kepada partai politik manapun. Termasuk ketika NW terkesan mendelegasikan sebagian kadernya dalam bidang politik seperti di pemerintahan eksekutif dan parlemen. Beberapa sumber mengatakan bahwa delegasi kader tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan khittah karena tidak berangkat dari kebijakan formal melainkan berdasarkan inisiatif pribadi para kader NW. Adapun dengan pemerintah, kecenderungan kerjasama yang terbangun lebih terhadap bagaimana mendukung program-program sosial yang memang dalam pandangan NW sendiri program-program tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

Klaim-klaim tentang NW sebagai *public sphere* dan NW sebagai jalur hegemoni sosial lambat laun akan sirna dengan kenyataan di mana sebenarnya NW berada. Hal ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana penumbuhan karakteristik masyarakat sipil khususnya yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Wathan, jika memang masyarakat benar-benar ingin memiliki kepastian identitas politik secara lebih terbuka dan mandiri. Sejauh ini, gambaran tentang bagaimana partisipasi NW dalam dinamika politik baik lokal maupun nasional dikenal di Lombok sebagai yang kerap kali tampil dengan aktor-aktor politik berikut dukungan warga NW secara menyeluruh.

Lalu bagaimana dengan NW sendiri dalam membangun kekuatan politik dan hegemoni sosialnya di tengah warga NW sendiri? Pertama, NW adalah institusi keagamaan yang sangat potensial memainkan simbol keagamaan dalam rangka menguatkan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat Lombok. Kedua, NW adalah institusi yang pada dasarnya tumbuh dan berkembang seiring dengan popularitas Syaikh Zainuddin, sehingga antara nama Syaikh Zainuddin dengan nama NW telah bersatu membentuk beragam simbol ke-NW-an yang setiap saat dapat dipakai untuk menuntut loyalitas segenap warga NW. Ketiga, NW adalah integritas keagamaan sekaligus identitas sosial di masyarakat Lombok. Melalui kekuatan integritas dan identitas tersebut, NW pun akan senantiasa memperoleh kesempatan setiap saat untuk melakukan apa saja yang memungkinkan bagi banyak sekali aktivitas selama penentu keberhasilannya berada pada skala kemasyarakatan. Tentu saja beberapa poin analisa ini adalah prediksi dan pertanyaan riset yang cukup menggelitik ilmuan sosial bila ditampilkan dalam ruang penelitian yang lebih kritis dan mendalam. Beranjak dari beberapa kemungkinan ini, hal utama yang akan diperhatikan pertama-tama adalah sejauh mana NW berdikari berdasarkan etika sosial kemasyarakatan, khususnya dalam aktualisasi politik, sosialisasi dan pengelolaan diskursus publik. Di sini,

penulis hanya akan dapat menyebutkan beberapa idealitas sebagai standarisasi dalam kemungkinan-kemungkinan tertentu, sebagai cara untuk meminimalisir berbagai argumentasi spekulatif yang justru akan mengaburkan sisi objektivitas. Di luar itu, realitaslah yang akan menentukan. Beberapa terma umum yang dapat dijadikan standarisasi dalam hal ini semisal kebijakan publik, bentuk kekuasaan, konflik, perilaku politik hingga dominasi dan konsensus yang menjadi dimensi-dimensi aktif dan tercermin dalam relasi antara NW dengan warganya, antara NW dengan pemerintah, dan relasi antar ketiga wilayah tersebut.

Inti dari beberapa hal di atas tidak lain adalah penegasan kembali eksistensi dan identitas universal NW dalam keberadaannya sebagai gerakan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, atau dengan kata lain, *civil society*. Harus ada penegasan itu. NW secara ideal tidak dapat digolongkan menjadi organisasi di mana terdapat para elit di dalamnya yang memanfaatkan loyalitas kader dengan bermain simbol keagamaan, keorganisasian dan kefiguran pendirinya (Syaiikh Zainuddin) hanya semata-mata untuk efektivitas politik pemerintah (negara), keuntungan pribadi-pribadi elit organisasi, sementara pada saat yang sama terjadi penekanan atas proses keberlangsungan pendewasaan sosial dan politik warga NW. Salah satu di antara sekian banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka penegasan tersebut adalah, reformulasi teologi politik dan sosial organisasi Nahdlatul Wathan.

### **Nahdlatul Wathan dan Transformasi Nilai Civil Society**

Transformasi *civil society* pada skala yang lebih menyeluruh dalam sketsa sosial masyarakat Lombok haruslah melalui jalur-jalur afiliasi sosial yang lebih dominan, dan dalam hal ini tentu saja NW adalah salah satu di antara yang paling determinan. Akan tetapi untuk pertama-tama, *civil society* haruslah dibawa ke pangkuan NW dengan berbagai pengertian yang secara keagamaan, kultur dan kepentingan yang lebih besar bersifat sejajar dapat diterima oleh

semua kalangan. Dalam perkembangannya, memang *civil society* adalah terma dan diskursus sosial yang sangat fleksibel, mengingat berbagai pengertiannya yang banyak mengalami reduksi, sesuai dengan kondisi dan situasi tempatnya diterapkan. Di kalangan NW sendiri, terdapat banyak sekali yang masih berhati-hati dengan kehadiran berbagai pengaruh sosial dari luar serta tetap berkomitmen dalam konservasi tata-nilai dan stabilitas sosial warga NW. Oleh karena itu terlebih dahulu *civil society* haruslah dipahami secara lebih positif, tidak dapat hanya dipandang sebagai sesuatu paham yang datang dari Barat dengan segudang misi-misi spesifik yang mengandung liberalisme, sekularisme, kebebasan yang tak terkendali, hingga feminisme yang mungkin saja langsung termentahkan bahkan sebelum terelaborasi secara lebih ilmiah.

Pertama, *civil society* adalah alat untuk mengintegrasikan pandangan hidup masyarakat dengan budaya universal kenegaraan, yakni demokrasi. Sampai sejauh mana *civil society* tumbuh dan berkembang sebagai karakteristik suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan semakin berpeluang untuk mengalami peningkatan stabilitas demokrasi. Ketika demokrasi adalah pandangan politik bangsa Indonesia, tentu saja *civil society* seharusnya menjadi karakteristik yang universal pula dalam segenap warga Indonesia di mana pun mereka berada.

Kedua, *civil society* adalah tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah ketika *civil society* merupakan barometer bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Ketika *civil society* termanifestasi secara matang dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tumbuh suatu kesadaran dan kedewasaan politik yang lebih mapan sehingga berbagai aktivitas sosial akan terjadi secara lebih terbuka dan *fair*. *Civil society* menghapus ragam kooptasi dan meminimalisir berbagai aktivitas hegemoni politik dan hegemoni sosial karena masyarakat telah realistis dan peka terhadap berbagai fenomena yang sarat politik dan cenderung mengeruk keuntungan dari masyarakat itu sendiri. *Civil society* menjadikan segenap dimensi sosial berperan secara aktif dalam realitas sosial dan berinteraksi dengan baik, semisal kritisme media, kemandirian kelas-kelas sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan tentunya, semakin terjaganya kemurnian agama

karena mengurangi adanya pemanfaatan simbol keagamaan. **Civil society** membentuk masyarakat yang mandiri dengan prinsip kesukarelaan, keswadayaan dan keswasembadaannya. Hal ini sangat menentukan **equality** dari pola hidup masyarakat dan sangat menentukan tingkat kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Ketiga, mengingat **civil society** adalah konsepsi tentang masyarakat yang fleksibel, berbagai kalangan yang merumuskan formulasi terhadap tata nilai suatu masyarakat dapat secara proporsional mengintegrasikannya dengan nilai-nilai kultural dan kearifan lokal. Oleh karena itu, dalam hal **review** karakteristik masyarakat Lombok dan khususnya NW, tidaklah akan bersifat kaku dan stagnan. **Civil society** tentu saja harus disandingkan dengan nilai kultural masyarakat Lombok, terutama sekali Islam. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menjadi suatu nilai dalam **civil society** dalam skala normatif, akan tetapi menjadi **frame** bagi alur-alur aktivitas sosial dan politik yang berdinamisasi dalam ruang lingkup keberdayaan **civil society**. Sebagai contoh, tertanamnya prinsip sosiologi Islam dalam dimensi sosial kemasyarakatan, tertanamnya prinsip politik Islam dalam tataran aktivitas politik berikut filosofi, etika, dan **frame** pergaulan yang berdasarkan pada prinsip politik Islam itu sendiri, prinsip ekonomi Islam dalam interaksi, perputaran ekonomi dan finansial masyarakat, dan berbagai prinsip-prinsip spesifikasi Islam yang lain. Hal ini akan menjaga penyentuhan formal tata nilai **civil society** dalam masyarakat sehingga tidak merusak stabilitas yang berporos pada prinsip lokal yang dalam hal ini adalah kultur dan keagamaan. Kompleksitasnya memang akan tercermin pada proses integrasi nilai, di mana integrasi itu menuntut formulasi baru dalam memanifestasikan **civil society**.

Dikehendaki atau tidak, NW adalah bagian dari dimensi **civil society** yang semestinya aktif mentransformasikannya dalam sketsa sosial masyarakat Lombok. Dalam skala itu, setidaknya untuk pertama-tama harus terdapat pergeseran paradigma pada idealitas NW terutama para elit dan aktivis organisasi dalam melihat sejauh mana NW dapat melakukan konvergensi sosial secara lebih holistik.

## 1. Ruang Lingkup dan ‘Demarkasi’ Sosial Politik

NW adalah organisasi yang menghendaki terciptanya masyarakat yang religius, sekaligus maju. Secara normatif, terdapat kalimat *li’i la’i kalimatillah idzzu al-Islam wa al-muslimin*, terdapat pula pembagian orientasi kerja yakni pendidikan, sosial dan dakwah, yang semuanya merupakan alat dan tujuan NW yang pertama dan utama. Keberpihakan NW terhadap Islam tidak bisa ditawar lagi, dan merupakan satu-satunya prinsip dasar yang fundamental. Akan tetapi melalui realitas sosial, NW justru tidak dapat mengelak bahwa bias dari aktivitasnya terakumulasi secara lebih besar dan pluralistik pada segenap masyarakat Lombok dalam berbagai kalangan, orientasi dan tingkatan sosial. Pengaruh NW ini bukanlah suatu kerugian melainkan keuntungan dan sekaligus peluang nyata bagi proses transformasi ke-NW-an yang lebih luas. NW sangat berpeluang sebagai wakil segenap masyarakat Lombok, menjadi arsitektur kemasyarakatan dan penentu arah kemajuan.

Namun di sisi lain, NW secara nyata berposisi sebagai penengah dalam hirarki politik kenegaraan, di atasnya terdapat negara dan di bawahnya terdapat masyarakat yang berdinamisasi dan sebagian besar bergantung padanya. Posisi seperti demikian memang terbentuk lebih secara alamiah dan juga terdefiniskan sebagai *civil society*, akan tetapi penegasan akan kecenderungan dan keberpihakan politik adalah tuntutan besar dalam rangka membangun identitas politik. Kejelasan tersebut, entah berbentuk berseberangan dengan politik kenegaraan atau membangun relasi dialogis-transaksional untuk kepentingan masyarakat, adalah awal mula dari tatanan utama dari *civil society*.

## 2. Rekonstruksi Struktur dan Manajemen

Struktur umum dari organisasi NW adalah hirarki eksekutif. Meski terdapat beberapa badan pertimbangan dan dewan kehormatan (*mustasyar*), akan tetapi badan-badan tersebut tidak lah berfungsi secara maksimal, terutama dalam

merumuskan dan mengevaluasi berbagai kebijakan organisasi. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pimpinan tertinggi bersifat multifungsi, baik sebagai perumus berbagai kebijakan, melaksanakan dan mengevaluasi karakteristik kepemimpinan yang memang rentan dengan otoritarianisme, dan dalam konteks NW, otoritarianisme ideologis dan figuristik. Mungkin pada perkembangan saat ini beberapa badan yang secara fungsional menjalankan tugas untuk merumuskan dan mengevaluasi berbagai kebijakan, akan tetapi tidak terdapat formalisasi berupa badan permanen mengenai fungsi-fungsi itu. Oleh karena itu proses-proses pengumpulan aspirasi dan isu, materi dan immateri, serta sumber-sumber yang beredar di tengah-tengah masyarakat tidak terakumulasi secara lebih komprehensif dan objektif, sehingga ketika keputusan keluar dan didistribusikan, masyarakat mungkin akan terasa asing dengan keputusan dan kebijakan tersebut. Demikian juga dengan evaluasi yang tidak terbangun dalam nuansa analisis yang lebih kritis, karena proses tersebut juga terlaksana dalam ruang hirarki eksekutif.

Dalam hal ini kebijakan hanyalah salah satu yang dapat disorot dalam mengidentifikasi celah-celah bagi terbukanya wawasan sosial dan politik suatu masyarakat. Jadi pada intinya menganalisa kebijakan hanya untuk melihat bagaimana dinamika manajemen dan kekuasaan dalam organisasi berjalan. Adalah hal yang sulit untuk dibayangkan, ketika mengharapkan masyarakat memiliki kemandirian, kepekaan, realistis dan keterbukaan dalam suatu manajemen atas masyarakat itu yang terpusat dan *top-down*.

### 3. Keutamaan Golongan Intelektual

Terdapat banyak sekali golongan intelektual dalam warga NW. Golongan intelektual atau cendekiawan tersebut adalah sumber daya dan kekuatan yang sangat menguntungkan bila organisasi melakukan akomodasi dan membuat mereka aktif, produktif dan kontributif secara optimal bagi kebaikan organisasi dan masyarakat. Mereka

mungkin bukanlah golongan yang dapat dikategorikan mampu berkontribusi dalam skala materil, spontan dan instan. Akan tetapi para cendekiawan selalu beraktivitas sesuai dengan standar keilmuan mereka, dan karenanya aktivitas keorganisasian akan terus-menerus mendapat evaluasi dan kontribusi melalui ragam keilmuan dari para cendekiawan.

Golongan intelektual tersebut terdiri dari banyak sekali disiplin ilmu. Semisal ilmuan agama, sosial, politik, psikologi, hukum dan budayawan hingga ilmuan komputer dan mesin. Masing-masing secara disipliner membentuk lingkaran keilmuan yang berwujud dan berorientasi secara konstruktif kepada organisasi NW. Secara ekspresif memang beberapa dari kalangan tersebut terlihat mengemuka dengan kritisme yang kerap kali dipandang sebagai pengganggu stabilitas organisasi, terutama yang memiliki kephahaman tentang mekanisme manajemen, wawasan politik dan dinamika sosial. Beberapa ilmuan agama dari mereka pun tidak jarang dicurigai sebagai membawa hal ihwal baru yang terlihat tidak memiliki keseragaman dengan stereotip paradigma Islam yang menjadi prioritas organisasi. Fenomena, yang mungkin berangkat dari miskomunikasi ini, semestinya tidak mesti ditanggapi secara radikal melalui ragam bentuk “pengusiran-sosial” yang merugikan semua pihak. Bila NW menanamkan keterbukaan atas lintas-kritik, dinamika ilmu dan wawasan yang lalu-lalang mengiringi langkah sosial organisasi, NW akan semakin dewasa tidak hanya dalam hitungan tahun, tapi keterbukaan, kualitas dan gejala-gejala positif dari masyarakat yang akan selalu mewarnai dan menghidupkan *civil society*.

#### 4. Kekuatan Organisasi; Keterbukaan dan Kemandirian Warga

Masyarakat yang terbuka dan *civilized* terutama sekali akan ditandai dengan beberapa karakteristik umum, yakni keswadayaan atau dukungan-dukungan yang berasal dari masyarakat itu sendiri, keswasembadaan atau kekuatan finansial yang telah ada sehingga masyarakat tidak tergantung

lagi pada pihak lain, terutama negara dan pemerintah, kesukarelaan atau masyarakat dengan partisipasi penuh (dalam berbagai hal aktivitas kemasyarakatan) dari anggotanya. Bilamana masyarakat Lombok telah mencerminkan ciri-ciri tersebut, maka itu setidaknya adalah bentuk umum dari perkembangan *civil society* di Lombok. Keterbukaan dan kemandirian ini akan sangat bergantung pada kesadaran dari pemegang otoritas berbagai dimensi strategis dalam masyarakat itu, terutama ideologi, politik, ekonomi, intelektual dan lain sebagainya; dan salah satu yang paling berperan di Lombok adalah organisasi Nahdlatul Wathan. NW dengan kekuatan sosial yang dimilikinya tidak lain adalah berangkat dari penyebaran ideologi dan politik dengan skala yang sangat dominan, hingga dengan saat ini. Masyarakat Lombok, terutama warga nadhliyin akan selalu mengikuti garis batas yang telah ditentukan oleh NW; sejauh mana garis batas kemandirian sosial itu dibuka, sejauh itulah masyarakat akan berjalan dalam ruang lingkup sosialnya.

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah, jika NW telah membuka selebar-lebarnya kran kemandirian warga, apakah warga akan secara langsung menjadi terbuka dan mandiri? Jawabannya tentu tidak. NW pada saat sekarang ini hanya memiliki kekuatan penuh dalam dinamika sosial pada sisi agama dan ideologi, serta wilayah-wilayah umum basis politik, sementara pada tataran ekonomi, intelektualitas, pemberdayaan modernitas dan teknologi, NW tidaklah mengambil bagian secara lebih signifikan. Kenyataan ini kemudian akan menjadikan NW tidak akan mampu mendampingi warganya secara utuh dalam menggapai keterbukaan, kemandirian dan kemajuan itu. Rasionalisasi sederhananya adalah, jika NW memiliki tekad untuk membangun *civil society*, yang tentunya pada ruang sosial Lombok dengan segala dinamika heterogenitas dan pluralitas di dalamnya, maka NW pun harus memegang seluruh kekuatan pada dimensi sosial yang mengarah dan berpijak pada komunitas masyarakat Lombok tersebut. Jika NW telah

menjadi pemegang utama kekuatan-kekuatan sosial tersebut, kemudian ditopang dengan keterbukaan, profesionalitas serta stabilitas politik di tubuh NW sendiri, maka NW pun akan sangat berpotensi dalam menumbuh-kembangkan *civil society* di Lombok.

## Penutup

Pendekatan *social movement* (gerakan sosial) sejatinya adalah untuk menganalisa latar-belakang tumbuh dan berkembangnya suatu gerakan sosial. Akan tetapi secara teoritis, teori gerakan sosial justru sekaligus memberikan semacam bentuk formulasi baru bagi rekayasa dinamika sosial, khususnya dialektika sejarah terhadap berbagai fenomena baik yang belum ada, telah ada maupun yang sedang menuju totalitas gerakannya. Perkiraan ini akan dapat terjawablah ketika mengurai proses ataupun eksistensi suatu gerakan, di mana wilayah-wilayah yang akan terakumulasi dalam bentuk-bentuk pendekatan teoritis akan terdinamisasi secara empiris. Mengembangkan suatu masyarakat dalam *frame civil society*, hal ini akan sangat membantu.

Pada kondisi masyarakat Lombok, arsitektur sosial dan politik yang lebih terarah masih sangat dituntut, khususnya ketika melihat gejolak serta dinamika yang jarang mencerminkan *civil society*. Ketika NW merupakan salah satu penentu bagi tumbuh dan berkembangnya *civil society* di Lombok, rekayasa sosial dan politik tersebut harus mengalami transformasi dan termanifestasi dalam organisasi NW. Beberapa gambaran yang telah diuraikan dalam tulisan ini merupakan sedikit saja dari apa yang dapat dilakukan oleh organisasi NW terhadap masyarakat Lombok menuju kondisi *civilized* tersebut. Saat ini NW masih memegang secara utuh suatu otoritas fundamental dan menjadi poros kebudayaan masyarakat Lombok, yaitu agama, demikian pula NW sekaligus sebagai identitas sosial dan politik sebagian besar warga masyarakat; suatu relasi strategis yang tidak hanya memberi angin segar bagi eksistensi dan perkembangan organisasi namun juga menggambarkan ribuan inisiatif terhadap bagaimana NW memberikan yang terbaik bagi

warganya, *Nahdliyin* secara khusus dan masyarakat Lombok secara umum.

### Daftar Pustaka

- Budiwanti, Erni, ***Islam Sasak; Wetu Telu versus Waktu Lima***, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Effendy, Muhadjir, ***Masyarakat Equilibrium: Meniti Perubahan dalam Bingkai Keseimbangan***, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Hikam, Muhammad AS., ***Demokrasi dan Civil Society***, Jakarta: Pustaka LP3S, 1996.
- Kraan, Van der dalam Fathurrahman Zakaria, ***Mozaik Budaya Orang Mataram***, Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998.
- Latif, Yudi, ***Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila***, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- Madjid, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul, ***Hizib Nahdlatul Wathan & Hizib Nahdlatul Banat***, Terj. Abdul Hayyi Nu'man, Anjani : PBNW, 2003.
- , ***Wasiat Renungan Massa Pengalaman Baru***, Pancor: PBNW, 1998.
- Nor, Mohammad dkk., ***Visi Kebangsaan Religius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1907-1997***, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Situmorang, Abdul Wahib, ***Gerakan Sosial, Studi Kasus Beberapa Perlawanan***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Subakti, Ramlan, ***Memahami Ilmu Politik***, Jakarta: PT. Grassindo, 2010.

